

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, transformasi digital telah menjadi salah satu faktor kunci dalam perubahan paradigma pelayanan publik, terutama di sektor pemerintahan. Di tengah upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, penerapan teknologi informasi menjadi semakin penting, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat yang diadopsi oleh banyak pemerintah daerah adalah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perencanaan terhadap kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Sehingga pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terukur dan terarah sesuai perencanaan yang telah dibuat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah.²

² Nanda Dias Ekaputra, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk," *Otonomi* 21, no. 1 (31 Mei 2021): 62, <https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606>. diakses pada 6 Maret 2024.

Fokus utama pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan membawa perhatian pada Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sebagai salah satu entitas kunci dalam manajemen keuangan daerah. Menerapkan Aplikasi SIPD menjadi langkah signifikan yang diambil oleh Badan Pendapatan Keuangan Daerah dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri NO. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dengan sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Tugas Pemerintahan daerah Mengajukan rancangan Perda.³

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat. Serta meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk pola kerjasama berbasis

³ Nasution and M.Si, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan." Dalam <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>, diakses 25 September 2023

data dan informasi. sehingga dapat membangun database yang ada di daerah yang dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan system informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat.⁴ Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penelitian ini akan mengambil studi kasus di Badan Pendapatan Keuangan Daerah Kota Blitar untuk mengukur efektivitas penerapan Aplikasi SIPD dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Aplikasi SIPD telah berhasil memfasilitasi proses pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Beberapa poin utama yang akan dianalisis meliputi dengan keterhubungan Data dan Informasi, sejauh mana Aplikasi SIPD dapat mengintegrasikan berbagai data dan informasi terkait keuangan daerah, termasuk pendapatan dan pengeluaran serta persepsi Pengguna, bagaimana persepsi para pengguna, termasuk staf di Badan Pendapatan Keuangan Daerah, terhadap efektivitas Aplikasi SIPD dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sebelum Penggunaan aplikasi SIPD pada sebelumnya

⁴ Wurara, Kimbal, and Kumayas, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado." Dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/31423/30082>, diakses 25 September 2023

BPKAD menggunakan sistem verifikasi sebuah SPM secara manual, yaitu berbentuk hardfile atau lembaran fisik, hingga jadi penumpukan yang kurang efisien.

Melalui analisis mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penerapan Aplikasi SIPD. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemerintah daerah lain yang juga sedang berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah melalui teknologi informasi.

Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran sentral dalam manajemen keuangan daerah, dan penerapan Aplikasi SIPD dianggap sebagai langkah signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Perubahan regulasi, seperti dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020, memberikan landasan hukum untuk penggunaan Aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan pengendalian keuangan daerah. Penerapan Aplikasi SIPD di Badan Pendapatan Keuangan Daerah Kota Blitar merupakan studi kasus untuk mengukur efektivitas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana Aplikasi SIPD telah berhasil mengintegrasikan data dan informasi keuangan daerah, serta mengukur persepsi pengguna, terutama staf di BPKAD, terhadap

efektivitas Aplikasi SIPD. Sebelum penerapan Aplikasi SIPD, BPKAD untuk penerbitan SP2D menggunakan sistem verifikasi manual, yang dianggap kurang efisien.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman atas program dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana ketepatan sasaran dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana ketepatan waktu dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah?
4. Bagaimana tercapainya tujuan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah?
5. Apa perubahan yang nyata dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemahaman atas program dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui ketepatan sasaran dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui ketepatan waktu dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
4. Untuk Mengetahui tercapainya tujuan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Untuk Mengetahui perubahan yang nyata dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

b. Batasan Masalah

1. Menetap di tempat obyek penelitian yang bertempat di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Penelitian akan berfokus pada ke efektivitas penerapan aplikasi SIPD dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah Kota Blitar.
3. Data yang dipakai dalam penelitian ini menerapkan data primer dan sekunder. Data primer akan didapat langsung dari informan memakai cara tanya jawab dan wawancara , data sekunder dimiliki berasal dari dokumen berkas di BPKAD Kota Blitar.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu di bidang akuntansi.
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan kajian bagi peneliti – peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara sistematis. Hasil penelitian ini

dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

b. Kepentingan Instansi

Sebagai saran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Blitar sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dalam penerapan aplikasi SIPD.

c. Kepentingan Pihak Akademik

Penelitian ini diharapkan sebagai kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah

F. Penegasan Istilah

Definisi Konseptual

Untuk penegasan istilah definisi konseptual dalam melakukan riset ini bisa dinyatakan sebagai di bawah ini :

1. Efektivitas

Efektivitas bisa didefinisikan sebagai ke valid an suatu pemakaian program ataupun sistem untuk menggapai tujuan, sehingga efektivitas penggunaanya unruk menggapai tujuan serta sasaran yang akan digapai. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau

menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁵

2. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.⁶

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accountability yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

⁶Kumalasari and Riharjo, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." Dalam <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>, diakses 25 September 2023

tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.⁷

4. Aplikasi SIPD

SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi nyata fasilitasi Kementrian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan. Laporan

⁷ Ibid.,

keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalam pengambilan keputusan ekonomi.⁸

G. Penulisan Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini peneliti akan membagi menjadi beberapa bab dan setiap bab akan dibagi sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang alasan dan gambaran penelitian mengambil topik tersebut menjadi acuan awal suatu penelitian. Pada bab ini nanti terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau teori-teori dari literature dan buku atau penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian. Di dalam bab ini terdiri dari Landasan Teoritis, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir Teoritis.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

⁸ Ningtyas, Pd, and Si, “*Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan)*.” Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/516535-none-62a00016.pdf>) diakses 21 September 2023

Bab ini berisi metodologi penelitian yang dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal. Terdiri dari : Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang penyajian data mengenai pemahaman informasi atas pertanyaan yang diberikan atau hasil wawancara dan data yang diperoleh melalui pengamatan, dan menajalskan temuan - temuan terkait efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjawab atas pokok permasalahan yang penulis teliti dan sasaran hasil analisis data yang bisa digunakan sebagai pihak – pihak terkait.